

Ruang Lingkup Perbandingan Administrasi Negara

Recognizing the artifice ways to acquire this books **Ruang Lingkup Perbandingan Administrasi Negara** is additionally useful. You have remained in right site to start getting this info. get the Ruang Lingkup Perbandingan Administrasi Negara belong to that we have the funds for here and check out the link.

You could purchase guide Ruang Lingkup Perbandingan Administrasi Negara or get it as soon as feasible. You could speedily download this Ruang Lingkup Perbandingan Administrasi Negara after getting deal. So, with you require the book swiftly, you can straight get it. Its consequently entirely simple and appropriately fats, isnt it? You have to favor to in this appearance

*Ruang Lingkup Perbandingan
Administrasi Negara*

Downloaded from biblioteca.undar.edu.pe
by guest

PETTY CONRAD

Pengantar Ilmu Administrasi Publik UNISMA PRESS

Banyak cara untuk memajukan ilmu hukum, termasuk menerbitkan karya tulis Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. dengan judul: *Pembangunan Hukum Administrasi Negara Melalui Pemberdayaan Yurisprudensi Peradilan Tata Usaha Negara* Tak ada yang meragukan perlunya buku semacam ini sebagai sebuah bahan acuan, pembandingan, pedoman dan sumber bagi para hakim pada lingkungan peradilan dan dapat pula membantu semua pihak terutama dari kalangan akademisi, teoritis, praktisi dan lain-lainnya yang ingin lebih mendalami secara intens, detail dan terperinci tentang Yurisprudensi Tata Usaha Negara yang digunakan sebagai sarana hukum untuk pembangunan Hukum Administrasi Negara dan yurisprudensi putusan pengadilan tata usaha negara. Tema-tema sentral utama yang dibahas dalam buku ini mencakup: Kerangka Konseptual dan Pembangunan Hukum Nasional; Pemberdayaan Putusan Pengadilan dalam Pembangunan Hukum Nasional; Hukum Administrasi Negara dan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara; Pemberdayaan Yurisprudensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk Pembangunan Hukum Administrasi Negara.

Hukum Administrasi Negara EDU PUBLISHER

Hukum Acara Peratun mengalami pasang surut yang sangat dinamis dalam kurun waktu dasawarsa terakhir (2008-2018). Dinamika tersebut ditandai dengan adanya perluasan dan penegasan kompetensi absolut Peratun dengan disahkannya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) dan hadirnya berbagai undang-undang sektoral yang mempengaruhi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh

Peratun. Berbagai undang-undang sektoral tersebut: (1) UU Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008); (2) UU Pelayanan Publik (UU No. 25 Tahun 2009); (3) UU Pengelolaan & Perlindungan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009); (4) UU Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (UU No. 2 Tahun 2012); (5) UU Pemilu (UU No. 7 Tahun 2017); (6) UU Konservasi Tanah & Air (UU No. 37 Tahun 2014); (7) UU Pilkada (UU No. 10 Tahun 2016). Derasnya arus perubahan dalam hukum administrasi tersebut, menuntut penelahaan dan pengkajian secara mendalam dan sistematis, untuk menyesuaikan, mengisi dan mengembangkan ruang-ruang kosong yang masih terhampar luas di antara hubungan norma-norma hukum baru dengan norma-norma hokum terdahulu. Buku ini secara konseptual-ideal berusaha menjawab kebutuhan tersebut dan secara teknis-praktikal dapat digunakan para mahasiswa fakultas hukum, praktisi hukum, akademisi, pemerhati peradilan dan siapa saja yang berminat dalam kajian bagaimana intensnya perkembangan hukum administrasi, khususnya dikaitkan dengan tugas dan fungsi Peratun, selama kurang lebih satu dasawarsa terakhir. Dalam beberapa hal buku ini dapat menjadi semacam panduan atau seperti yang penulis ungkapkan dalam Blue Book 2016 EU-Indonesia Development Cooperation in 2015: "This kind of technical guidance is critical to equip us to meet the demands of our times. New laws and regulations require careful consideration of the prevailing realities, and this support provides important space that allows us to shape our interpretation.

Daftar buku - Ikatan Penerbit Indonesia Penerbit NEM

Dengan diterbitkannya buku ini, diharapkan dapat membuka wawasan para pembaca buku terhadap hukum ilmu pertanahan yang berlaku di Indonesia pada umumnya lebih khusus buku ini dapat memberikan keterampilan kepada para praktisi hukum di dalam menyelesaikan perkara pertanahan yang ada di Indonesia.

Dengan adanya pengetahuan pembaca terkait tentang hukum pertanahan, diharapkan hal ini dapat menjadi obat atas ketidakpahaman masyarakat akan pengetahuan hukum pertanahan hal ini pula sesuai dengan adagium hukum yang berbunyi "Lex Semper Dabit Remedium" yang artinya adalah Hukum selalu memberi obat. Hal ini merupakan nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh penulis yang berkomitmen akan selalu memberikan obat kepada siapa pun yang mencari keadilan/para pencari keadilan khususnya para pencari keadilan dalam hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia. Buku persembahkan penerbit PrenadaMedia #Kencana [EKONOMI PUBLIK](#) Prenada Media Buku ini merupakan hasil karya yang dapat dijadikan sumber belajar bagi mahasiswa sebagai dasar dalam melakukan pembelajaran. Buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akademisi sehingga menjadi buku yang signifikan. Untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya, penulis menyusun buku ini dalam beberapa bagian bab.

Pengantar Hukum Indonesia Deepublish

Buku Hukum Administrasi Negara yang kita sajikan memiliki kelebihan dibandingkan dengan buku hukum administrasi negara yang ada sekarang karena membahas tentang hukum administrasi negara menurut UU No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan serta membandingkan dengan undang-undang yang terdahulu. Kelebihan laen di dalam UU No 30 Tahun 2014 tersebut adalah penggunaan simbol "Citizen Friendly" dalam suatu produk aturan perundangan tersebut yang merupakan prototype baru dalam sejarah perjalanan peraturan perundangan dalam kehidupan berbangsa khususnya Dalam Simbolisasi Administrasi Pemerintahan di Indonesia. Dengan simbol itu suatu tata nilai baru akan dijunjung tinggi dan akan

dijadikan dasar evaluasi dalam perjalanannya. Menarik untuk dicermati dan ditelusuri kenapa simbolisasi tersebut sampai tercantum dalam produk hukum dan baru kali ini tercantum dalam aturan perundangan di Indonesia. Rumusan tersebut tercantum secara eksplisit pada bagian penjelasan umum undang-undang nomor 30 tahun 2014. Legislatur Undang-undang ini terkesan ingin membangun image baru dan pesan baru yang sengaja dikobarkan lewat simbol itu. Yakni kesan dan pesan baru tentang administrasi pemerintahan yang “ramah” serta sifat kesamaan kedudukan antara “penguasa” dengan “yang dikuasai”. Citizen Friendly dalam bidang administrasi, biasa dikaitkan dengan reformasi birokrasi, yang dikaitkan dengan bagaimana membangun administrasi pemerintahan yang ramah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pesan yang lain terdapat keinginan berubah secara mendasar tentang administrasi pemerintahan di Indonesia, yang semula cenderung lebih menonjolkan faktor otoritas formal dari sebuah kekuasaan, berubah menuju administrasi pemerintahan yang ramah, dengan mendasarkan pada kemampuan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, dengan mendasarkan pada azas bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Diharapkan buku ini dapat menjadi bahan acuan bagi semua pihak, khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum untuk mengenal dan mengetahui tentang perkembangan terbaru hukum administrasi negara menurut UU No 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

Sistem Hukum dan Penegakan Hukum Jejak Pustaka Buku hukum yang berjudul Sistem Merit dalam Perspektif Perbandingan Hukum Kepegawaian Aparatur Sipil Negara merupakan buku karya penulis Halim. Buku ini dapat menjadi salah satu referensi dalam kajian Hukum Administrasi Negara khususnya Hukum Administrasi Kepegawaian maupun kajian Administrasi Publik khususnya Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur mengingat masih terbatasnya referensi aktual berbahasa Indonesia yang membahas mengenai hukum administrasi kepegawaian aparatur sipil negara maupun manajemen sumber daya manusia aparatur, baik secara filosofis, teoritik, maupun normatif. Buku Sistem Merit dalam Perspektif Perbandingan Hukum Kepegawaian Aparatur Sipil Negara akan membahas urgensi sistem merit pada bagian pendahuluan, sistem merit dan meritokrasi, sejarah sistem merit, dan penerapan sistem

merit. Penggunaan materi-materi esensial dan aktual tersebut sebagai kekuatan, menjadikan buku ini berbeda dari buku-buku lain sejenis yang beredar. Buku Sistem Merit dalam Perspektif Perbandingan Hukum Kepegawaian Aparatur Sipil Negara memuat daftar isi yaitu sebagai berikut : Bab I - Pendahuluan Bab II - Metode Kajian Bab III - Sistem Merit dan Meritokrasi Bab IV - Sejarah Sistem Merit Bab V - Sistem Merit dalam Hukum Kepegawaian Bab VI - Tindakan Afirmasi Spesifikasi buku ini meliputi : Kategori : Hukum Penulis : Halim E-ISBN : 978-623-02-2261-0 Ukuran : 15.5x23 cm Halaman : 88 hlm Tahun Terbit : 2020 Penerbit Deepublish adalah penerbit buku yang memfokuskan penerbitannya dalam bidang pendidikan, terutama pendidikan tinggi (universitas dan sekolah tinggi). Buku ini tersedia juga dalam versi cetak. Dapatkan buku-buku berkualitas dengan pilihan terlengkap hanya di Toko Buku Online Deepublish : penerbitbukudeepublish.com.

Metodologi Penelitian Hukum Jakad Media Publishing Judul : EDUCATION FOR ALL STUDI KASUS PENDIDIKAN LINTAS NEGARA (MATERI KULIAH PERBANDINGAN PENDIDIKAN) Penulis : MARYUS SUPRAYADI Editor : IRWAN, M.Pd.I Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 520 Halaman ISBN : 978-623-497-675-5 SINOPSIS “EDUCATION FOR ALL” adalah suara nurani dua insan pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara dan Raden Ajeng Kartini; katanya memang tidak terungkap dalam bahasa mereka, namun jauh terbentuk dalam sikap mereka. Lebih menakjubkan lagi suaranya tercetus jauh sebelum UNESCO sebagai lembaga pendidikan dan kebudayaan dunia dengan narasi-narasi mutual understanding between countries, membangun peace-education atas dasar kemanusiaan, meningkatkan wawasan multi-cultural education sebagai pijakan perbandingan pendidikannya, namun lebih dari itu mempelajari kelemahan dan keunggulan, keberhasilan dan kegagalan, persamaan dan perbedaan teori dan praktek pendidikan di berbagai negara, akan mampu melahirkan pernyataan sikap sebagian kita tentang “inferioritas negara underdeveloped” yang berlebihan terhadap negara maju dengan pretensi bahwa segala sesuatu yang berasal dari negara maju (Barat) adalah simbol kemoderenan dan kemajuan merupakan wrong and false paradigm, karena akan menimbulkan krisis identitas bangsa itu sendiri. Selain itu, ketergantungan pendidikan dengan negara maju yang terlalu lama dan berlebihan, tanpa adanya upaya pembaharuan pendidikan di

negara tuan rumah, bisa menyebabkan asosiasi dan asimilasi budaya yang mungkin kebablasan. Membaca buku “Education For All” insya Allah akan dapat mengurangi rasa apriori anda dengan bangsa dan negara anda sendiri.

Penyuluh landreform dan agraria Penerbit Alumni

Buku ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan banyak pemula ketika pertama kali mempelajari politik konstitusional sebagai cabang khusus dari mata kuliah sejarah—kebutuhan akan buku teks pengantar yang tepat. Selama beberapa tahun ini, merupakan suatu kebahagiaan dan sudah menjadi pekerjaan bagi saya untuk membantu mahasiswa menghadapi saat-saat pertama mengenal ilmu politik agar tidak merasakan kekhawatiran yang tidak perlu.

Pelayanan Publik di Era Tatanan Normal Baru Humanities Genius

Sengketa kepegawaian merupakan perselisihan yang timbul akibat adanya suatu keputusan tata usaha negara di bidang kepegawaian oleh badan atau pejabat yang berwenang mengenai kedudukan, hak, kewajiban atau pembinaan PNS. Ini terjadi misalnya karena adanya ketidakseimbangan antara pelanggaran yang telah dilakukan dengan sanksi yang dijatuhkan sehingga menghasilkan putusan hukuman yang tidak tetap. Selain itu, bisa juga karena adanya prosedur-prosedur yang dilangkahi atau kelengkapan administrasi yang belum terpenuhi sehingga penjatuhan hukuman tersebut pun bisa jadi perbuatan hukum “sepihak”. Berkaitan dengan sengketa kepegawaian tersebut, buku ini membahas mengenai materi utamanya yang meliputi permasalahan, penyelesaian hingga analisa kasus atas sengketa kepegawaian itu. Adapun terkait sengketa kepegawaian tersebut penting untuk disampaikan karena selain sengketa kepegawaian adalah kasus yang acap terjadi di Indonesia, juga karena tak jarang pihak pencari keadilan dalam bidang sengketa kepegawaian tidak memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum. Dengan kehadiran buku ini, selain dapat dijadikan sebagai bahan bacaan, baik bagi mahasiswa dan akademisi, diharapkan buku ini dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai arah pembentukan hukum yang seharusnya dalam rangka penyelesaian sengketa kepegawaian sehingga ada jaminan kepastian hukum.

Panduan Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dan Persidangan Elektronik (E-Litigasi) Media Sains Indonesia

Buku ini diawali dengan mengulas problem ketidakpercayaan (distrust) yang jamak terjadi di antara para pemangku kepentingan di sektor pengadaan barang/jasa pemerintah Indonesia. Uniknya, kecurigaan terjadi bukan saja karena ASN yang terlibat pengadaan dituding oleh aneka pihak bahwa mereka telah melakukan penyimpangan, tetapi juga karena terdapat aneka oknum aparat penegak hukum (APH) yang diindikasikan memeras ASN atau memengaruhi proses penentuan pemenang tender secara ilegal. Buku ini menjelaskan adanya norma hukum yang keliru secara konseptual, namun terus dipertahankan di level praktik, sehingga peluang APH untuk abuse of power terus terjadi. Selain menyinggung dan memberikan solusi untuk hal di atas, buku ini utamanya juga menunjukkan ada aneka masalah pokok--baik di eksekutif maupun yudikatif--yang kerap terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa, yaitu dokumen pengadaan di-setting untuk menguntungkan calon peserta tender tertentu; terdapat distrust pada mekanisme sanggah dan sanggah banding, penetapan pemenang tender yang dipandang kurang transparan, dan kekurangmampuan lembaga peradilan dalam menyediakan perlindungan hukum yang efektif. Guna mengatasi masalah tersebut, penulis menggunakan pendekatan asas-asas umum tata kelola pemerintahan yang baik dan pendekatan perbandingan hukum (baik pada level konsep, regulasi, dan kajian putusan) dengan Negara Belanda dan Inggris. Buku ini ditutup dengan temuan dan rekomendasi konseptual dan praktikal untuk lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Sada Kurnia Pustaka
 Hukum Administrasi Negara merupakan hukum yang mengatur fungsi pemerintah (Hukum Administrasi Negara Heteronom) dan sekaligus terdiri dari serangkaian norma hukum yang diciptakan oleh pemerintah (Hukum Administrasi Negara Otonom). Para ahli melihat semakin pentingnya Hukum Administrasi Negara untuk menjaga tegaknya pilar negara hukum (rechtstaat dan rule of law). UUD Negara RI 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum tanpa memberikan atribut rechtstaat seperti di masa lalu. Dengan demikian, meskipun secara historis Hukum Administrasi Negara di Indonesia tumbuh di atas fondasi sistem negara hukum rechtstaat, namun, dapat diisi dan dilengkapi dengan prinsip-prinsip rule of law. Substansi buku ini memadukan konsep-konsep Hukum Administrasi Negara baik yang

berkembang di atas fondasi rechtstaat di Eropa maupun di atas fondasi rule of law di Anglo Saxon.

Berita bibliografi Prenada Media

Sistematika buku "Pengantar Ilmu Administrasi Publik" ini mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 17 Bab, diantaranya: Bab 1. Konsep Dasar Administrasi yang membahas tentang Konsep Administrasi, Fungsi-Fungsi Administrasi, dan Ruang Lingkup Administrasi, serta Unsur-Unsur Administrasi; Bab 2. Sejarah Perkembangan Administrasi Publik membahas tentang Sejarah Administrasi dalam Perspektif Modern, dan Sejarah Administrasi Publik dalam Perspektif Islam, serta Perkembangan Administrasi Publik di Indonesia; Bab 3. Unsur-Unsur Administrasi membahas tentang Pengertian Unsur Administrasi, Organisasi sebagai Unsur Administrasi, Manajemen sebagai Unsur Administrasi, Tata Hubungan/Komunikasi sebagai Unsur Administrasi, Pegawai sebagai Unsur Administrasi, Keuangan sebagai Unsur Administrasi, Perbekalan sebagai Unsur Administrasi, dan Tata Usaha sebagai Unsur Administrasi, serta Perwakilan atau Hubungan Masyarakat sebagai Unsur Administrasi; Bab 4. Perbandingan Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis membahas tentang Administrasi Publik, dan Administrasi Bisnis, serta Perbandingan; Bab 5. Konsep Dasar Administrasi Publik membahas tentang Konsep Dasar Administrasi Publik, Pengertian Administrasi, Pengertian Publik, Pengertian Administrasi Publik, Ruang Lingkup Administrasi Publik, dan Perbedaan Administrasi Publik dan Administrasi Negara, serta Peranan Administrasi Publik; Bab 6. Teori-Teori Administrasi Publik membahas tentang Teori Administrasi Publik, Teori Birokrasi, dan Teori Administrasi sebagai Teori Politik, serta Teori Kepemimpinan; Bab 7. Sarana-Sarana Administrasi Publik membahas tentang Sarana-Sarana di dalam Administrasi Publik; Bab 8. Paradigma Administrasi Publik yang membahas tentang Fase-Fase Paradigma Administrasi Publik, serta Paradigma Utama dalam Administrasi Publik; Bab 9. Perkembangan dan Pergeseran Paradigma Administrasi Publik yang membahas tentang Old Public Administration, New Public Management, serta New Public Service; Bab 10. Reformasi Administrasi Publik yang membahas tentang Pengertian Reformasi Administrasi Publik, dan Strategi Reformasi Administrasi, serta Tantangan Reformasi Administrasi; Bab 11. Administrasi Publik dan Kebijakan Publik membahas tentang

Konsep Administrasi Publik, Perkembangan Administrasi Publik, dan Terminologi Kebijakan, serta Pengertian Kebijakan Publik; Bab 12. Administrasi Kepegawaian yang membahas tentang Administrasi, serta Administrasi Kepegawaian; Bab 13. Birokrasi Administrasi membahas tentang Sejarah Munculnya Konsep Birokrasi, Pengertian Birokrasi, dan Karakteristik Ideal Birokrasi, serta Birokrasi Pemerintahan; Bab 14. Pelayanan Publik dalam Administrasi Publik membahas tentang Pelayanan Publik dalam Administrasi Publik, Konsep, Dimensi dan Ruang Lingkup Kualitas Pelayanan Publik; Bab 15. Good Governance yang membahas tentang Definisi Good Governance, serta Prinsip-Prinsip Good Governance; dan Bab 16. Collaborative Governance yang membahas tentang Pemahaman Collaborative Governance, dan Model Collaborative Governance; serta Bab 17. Sound Governance yang membahas tentang Evolusi Konsep Tata Kelola Pemerintahan, Pengertian Sound Governance, dan Komponen Utama dan Prinsip-Prinsip Sound Governance, serta Sound Governance Arah Baru Tata Kelola Pemerintahan di Era Globalisasi.

Administrasi negara Prenada Media

Perkembangan mengenai hukum acara dan hukum materiel tata usaha negara atau hukum administrasi negara di Indonesia beberapa tahun belakangan sangat pesat. Dengan diundangkannya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 6 Tahun 2018, PERMA No. 1 Tahun 2019, dan PERMA No. 2 Tahun 2019 mengubah paradigma besar-besaran atas kompetensi absolut peradilan tata usaha negara, mengenai upaya administratif sebagai upaya pra-litigasi, dan mengenai persidangan elektronik. Selain itu terdapat pula sengketa-sengketa khusus yang menjadi kewenangan mengadili peradilan tata usaha negara dari berbagai undang-undang. Oleh karena itu, buku ini hadir untuk mengulas perkembangan-perkembangan tersebut sekaligus menjadi pedoman ringkas bagi pihak-pihak yang beracara di peradilan tata usaha negara, baik dari segi materiel maupun formil. Buku ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dalam matakuliah hukum acara peradilan tata usaha negara di kampus hukum, serta menjadi buku pegangan bagi para praktisi dan akademisi, baik dosen, pengacara, paralegal, aparatur pemerintahan maupun hakim. Buku persembahkan penerbit PrenadaMedia #Kencana

Alquran dan ilmu politik Muhammadiyah University Press Pengantar Hukum Indonesia maupun pengantar ilmu hukum sama-sama merupakan pengantar untuk mempelajari hukum, dan merupakan matakuliah dasar yang wajib dikuasai oleh setiap mahasiswa fakultas syariah dan hukum. Pengantar hukum Indonesia mempelajari hukum yang berlaku di suatu tempat (dalam hal ini Indonesia), serta terikat pada waktu tertentu (dalam hal ini hanya hukum yang sedang berlaku saat ini saja). Pengantar Hukum Indonesia merupakan pengantar untuk mempelajari bidang-bidang/aturan/ketentuan/tata hukum yang berlaku di Indonesia. Objek Pengantar Hukum Indonesia adalah peraturan-peraturan hukum yang sedang berlaku di Indonesia saat ini (hukum positif Indonesia). Buku ini akan memberikan pemahaman bagi mahasiswa hukum strata satu, dua, dan tiga tentang apa yang dimaksud ilmu hukum terkait tentang definisi hukum, manusia, masyarakat, dan norma, tujuan hukum, fungsi hukum, subjek dan objek hukum, klasifikasi hukum, sumber hukum, serta tentang tinjauan umum hukum dalam Islam. Selanjutnya buku ini menjelaskan sejarah hukum di Indonesia dimulai zaman masa Majapahit, masa penjajahan Belanda, masa penjajahan Jepang, dan zaman kemerdekaan. Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah: Pendekatan Perbandingan Hukum Deepublish Negara melalui pemerintah dalam melayani kebutuhan publik selalu diperhadapkan dengan jenis dan jumlah masalah yang berbeda-beda tingkat kebijakannya. Tidak ada satupun model kebijakan yang dapat dipertahankan secara terus-menerus dengan arogansi kelembagaan. Penggunaan model kebijakan sangat bergantung pada penelitian terhadap masalah publik yang terus berkembang, dan oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa asal muasal suatu kebijakan sebenarnya berawal dari masalah-masalah yang dihadapi oleh warga Negara. Walaupun demikian, dalam pembentukan kebijakan publik sebenarnya tidak ada satu kebijakan yang secara utuh diterapkan sejak diputuskan. Kadang-kadang, suatu kebijakan perlu ditinjau di tengah-tengah proses penerapannya dengan asumsi bahwa arah kebijakan tidak lagi mengarah pada sasaran. Sebagai suatu kajian pengantar, buku ini memberikan uraian mengenai bagaimana konsep dan teori dasar yang berkaitan dengan pembentukan kebijakan publik. Tentu saja karena merupakan kajian dasar, buku ini tidak secara panjang

lebar menguraikan kebijakan publik yang memiliki sifat administratif, karena hal tersebut memerlukan pembahasan tersendiri. Pembentukan kebijakan publik tidak hanya melibatkan para sarjana dengan disiplin ilmu sosial saja, tetapi juga memerlukan kajian ilmu-ilmu eksakta. Buku ini cukup sarat dengan referensi asing, meski terdapat juga referensi dari penulis Indonesia, karena penggunaan referensi asing tersebut sesuai dengan keperluan penulisan buku ini. Buku ini mengejar primary sources dari setiap konsep yang diberikan oleh para ahli kebijakan publik. Buku ini awalnya terdiri dari 5 (lima) bab utama. Bab I terdiri dari Pendahuluan yang berisikan latar Belakang serta Ruang lingkup pembahasan. Pada Bab II, buku ini menguraikan mengenai Konsep Kebijakan Publik, yang meliputi Pengertian Kebijakan Publik, Kebijakan Publik dan Administrasi Publik, Studi Kebijakan Publik: Fungsi dan Tujuannya, Ruang Lingkup dan Siklus Kebijakan Publik, serta Kebijakan Publik Sebagai Suatu Sistem. Bab III mengkaji perihal Analisis Kebijakan Publik yang di dalamnya membahas mengenai Konsep dan Teori Analisis Kebijakan, Model Analisis Kebijakan Publik, Proses Analisis Kebijakan Publik, Risiko Analisis Kebijakan, serta Analisis Biaya dan Manfaat (Cost-Benefit Analysis) dan Analisis Efektifitas Biaya (Cost-Effectiveness Analysis). Bab IV membahas mengenai Proses Kebijakan Publik, yang memuat konten pembahasan seputar Konsep Perumusan Kebijakan Publik, Model-Model dan Teori Formulasi Kebijakan, Identifikasi Masalah Publik, Penyusunan Agenda (Agenda Setting), serta Pembuatan Keputusan (Decision Making). Terakhir Bab V menguraikan Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik, Konsep Implementasi Kebijakan Publik, Pendekatan Implementasi Kebijakan, Model dan Proses Implementasi Kebijakan Publik, Evaluasi Kebijakan Publik, Langkah dan Metode Evaluasi Kebijakan, serta Masalah-Masalah dalam Evaluasi Kebijakan.

Konstitusi-Konstitusi Politik Modern UGM PRESS

Metode Penelitian Hukum merupakan sebuah ikhtiar untuk mencari kebenaran hukum terhadap permasalahan di dalam hukum. Penelitian hukum merupakan kegiatan untuk menemukan aturan hukum, norma-norma hukum, atau doktrin-doktrin hukum, dengan tujuan untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Hal ini konsisten dengan karakteristik ilmu hukum yang bersifat preskriptif. Berbeda dengan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan yang bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk

menghasilkan argumen, teori, atau konsep baru sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Besar harapan buku ini dapat menjadi bahan bacaan dan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana, pengajar Metode Penelitian Hukum serta peneliti hukum. Sehingga buku ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akademisi sehingga menjadi buku yang signifikan. Untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya, penulis menyusun buku ini dalam beberapa bagian bab. Buku ini terdiri dari tiga belas bab, Pertama Pengertian dan Ruang Lingkup Penelitian Hukum, Kedua Konsep dasar dan Karakteristik Penelitian Hukum, Ketiga Perumusan Masalah dan Hipotesis Penelitian Hukum, Keempat Kajian Pustaka dan Kerangka Teoritis Penelitian Hukum, Kelima Jenis-jenis penelitian Hukum, Keenam Strategi dan Metode Penelitian Hukum, Ketujuh Etika Penelitian Hukum, Kedelapan Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian Hukum, Kesembilan Penelitian Hukum Komparatif, Kesepuluh Penelitian Socio Legal, Kesebelas Penelitian Hukum Normatif, Keduabelas Penelitian Hukum Empiris, Ketigabelas, Pengembangan Metode Penelitian Hukum untuk Penelitian masa depan.

Hukum Administrasi Negara CV. Social Politic Genius (SIGn) Pengantar Hukum Indonesia (PHI) merupakan bagian dari Pengantar Ilmu Hukum (PIH) karena merupakan bagian kecil dari ilmu hukum di dunia. Akan tetapi, keduanya memiliki relevansi atau hubungan yang signifikan karena memiliki objek yang sama, yaitu hukum. Adapun buku ini pada prinsipnya menyuguhkan pelbagai materi terkait mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia sehingga diharapkan dapat membantu para mahasiswa untuk memahami tata hukum di Indonesia dengan segenap seluk-beluknya. Materi buku ini berisikan mengenai konsep dasar hukum dan sistem hukum, Sejarah Hukum, Hukum Islam, Penggolongan Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dan sebagainya. Buku ini dapat dibaca oleh para mahasiswa fakultas hukum, mahasiswa fakultas syariah, pengajar, para peneliti, pengamat, dan praktisi hukum.

PERBANDINGAN PENYELESAIAN PERKARA KORUPSI DELIK SUAP ANTARA INDONESIA DAN BELANDA wawasan Ilmu Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 Regarding

Marks and Geographical Indication = Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis This book is in English and Indonesian = Buku ini Berbahasa Inggris dan Indonesia
PERBANDINGAN PENDIDIKAN PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers
Eksistensi buku ini, menjadi jawaban dari harapan publik atas penyelenggaraan administrasi negara yang telah dijalankan oleh pemerintah, dimana konsep tentang administrasi negara,

merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji sistem pelayanan negara dan penyelenggaraan negara dengan menggunakan pendekatan perbandingan. Perbandingan ini bertujuan membandingkan pola-pola administrasi dari berbagai sudut pandang
Ilmu Negara (Kajian Hukum dan Kenegaraan) Sinar Grafika
Buku ajar ini saya susun sebagai bahan kajian bagi para mahasiswa dan pemula, pemerhati hukum, serta peminat pada umumnya yang tertarik untuk mempelajari seluk-beluk mengenai

perbandingan hukum tata negara sebagai ilmu pengetahuan hukum. Sebetulnya sudah banyak buku ajar bahkan buku yang sudah ditulis oleh para ahli mengenai hal ini sebelumnya. Akan tetapi, pada umumnya buku-buku ajar tersebut materi muatannya tidak menggambarkan perkembangan realitas atau kondisi kekinian (kontekstual) pada dinamika tahapan sejarah yang ada. ulasan pada tiap bab penulis menggunakan bahasa yang sederhana sehingga materi-materi yang disajikan kontennya (isinya) dengan mudah ditansfer kedalam pikiran mahasiswa